

SKRIPSI

**DAMPAK PEMBANGUNAN TERAS MALIOBORO TERHADAP
KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA**



Disusun Oleh:

PASKALIS TILANI GUSREN

NIM 19510043

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

SKRIPSI

**DAMPAK PEMBANGUNAN TERAS MALIOBORO
TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA**



Disusun Oleh:

PASKALIS TILANI GUSREN

NIM 19510043

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2024



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis, 20 Juni 2024
Jam : 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

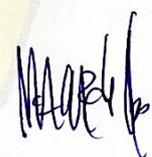
Dra. Sri Widayanti, S.Pd.I.,M.A.
Ketua Penguji/Pembimbing



Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.
Penguji Samping I



Drs. Oelin Marliyantoro, M.Si.
Penguji Samping II



Menyetujui

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial



Dra. MC Candra Rusmala Dibyorini, M.Si.

NIY 170 230 173

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paskalis Tilani Gusren

Nim : 19510043

Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul “DAMPAK PEMBANGUNAN TERAS MALIOBORO TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA “ adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk saya nyatakan benar.

Yogyakarta, 20 juni 2024

yang menyatakan



Paskalis Tilani Gusren

NIM 19510043

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir penulis ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Agustinus Bagus dan Mama Emerensiana Deti yang telah menghadirkan, membimbing serta mendidik sehingga saya bisa seperti sekarang.
2. Untuk saudara dan saudari saya kakak Ica, kakak Liver adik Nila dan Adrian serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi serta dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk teman saya Nanok, Noven, Junet, Erto, jilong, Memet, Nguik, yang selalu bersama-sama dalam susah dan senang, serta selalu menukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk PKL di Teras Malioboro yang telah merelakan waktunya menjadi responden dalam penelitian saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini,
5. Untuk Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk menimbah ilmu sampai selesai.

MOTTO

“Serahkanlah segala kekawatiranmu kepadaNya
Sebab dia yang memelihara kamu”

(1 Petrus 5:7)

“setiap keberhasilan yang saya raih adalah hasil dari
doa kedua orang tuaku “

(EH)

“Jangan sombong,sadarlah bahwa keberhasilan yang diraih tidak
pernah terlepas dari bantuan orang lain. Ingat dan janganlah kamu
berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya
kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu
tidak akan sampai setinggi gunung “

(John IQ7)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, “APMD” Yogyakarta. Adapun judul skripsi ini yaitu DAMPAK PEMBANGUNAN TERAS MALIOBORO TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari pihak lain. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan tuntunan yang diterima penulis selama melakukan penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis ingin sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Suturo Eko Yunanto, selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si selaku ketua program studi Pembangunan Sosial
3. Ibu Dr. Sri Widayanti, S.Pd.,M.A selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pedagang kaki lima di Teras malioboro, yang telah bersedia memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Teras Malioboro.

5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
6. Keluara besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang besar sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dengan tulus doa,dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Yogyakarta, 11 juni 2024

Penulis,



Paskalis Tilani Gusren

NIM 19510043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori	7
1. Pembangunan.....	7
2. Kesejahteraan.....	12
3. Pedagang kaki lima.....	15
E. Metode penelitian	17
1. Jenis penelitian	17
2. Ruang lingkup penelitian.....	18
3. Subjek penelitian	19
4. Teknik pengumpulan data.....	20
5. Teknik analisis data	21
BAB II DESKRIPSI UMUM TERAS MALIOBORO	23
A. Kondisi Teras Malioboro.....	23
1. Sejarah Berdirinya Teras Malioboro	23
2. Kondisi Demografis	24
B. Sarana Dan Prasarana	29
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	32
A. Identitas Informan	33

B. Analisis Dan Pembahasan	35
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
PANDUAN WAWANCARA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Subjek Penelitian.....	19
Tabel 2. 1 Jumlah Pedagang di Teras Malioboro	25
Tabel 2. 2 Jumlah Pedagang Berdasrkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2. 3 Jumlah Pedagang Berdasarkan Peguyuban	27
Tabel 2. 4 Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gedung Teras Malioboro 1 dan 2	24
Gambar 2. 2 Peta lokasi teras malioboro 1 dan 2.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kawasan Malioboro Yogyakarta sebagai tempat wisata populer sekaligus ikon Kota Yogyakarta menjadi sebuah destinasi yang banyak didatangi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kawasan wisata Malioboro memiliki banyak elemen di dalamnya yang turut menjadi daya pikat bagi wisatawan, salah satunya adalah kehadiran PKL yang menjual kuliner, souvenir, dan produk lainnya.

Sebagai pusat destinasi wisata bagi wisatawan Malioboro dikatakan berhasil karena wisatawan yang berkunjung bukan hanya berasal dari lokal tetapi dari mancanegara pun pasti tak melewatkan objek wisata yang satu ini. Bagi masyarakat sekitar, Malioboro berperan sebagai pusat perekonomian yang pas karena banyak keuntungan yang diperoleh setiap harinya. Para pemilik toko, pedagang kaki lima, juru parkir, juru becak semua menggantungkan perekonomiannya di Malioboro. Karena hal inilah banyak kita jumpai masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan Malioboro tanpa memegang izin legalitas berjualan. Banyak pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas trotoar menjadi lapak untuk berjualan dan lapak-lapak tersebut membuat kawasan jalan Malioboro menjadi kumuh dan tidak rapi.

Pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL adalah sebutan bagi pedagang yang menjual dagangannya dengan menggunakan grobak. Pedagang kaki lima Biasanya pedagang kaki lima menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial,

fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap Widiyarta, A. (2020:92).

Pedagang kaki lima merupakan jenis golongan usaha kecil menengah dengan memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil yang mana berbunyi bahwa golongan usaha kecil dapat lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Namun faktanya pedagang kaki lima di kawasan Malioboro menimbulkan masalah dan ketidaknyamanan bagi para wisatawan. Hal tersebut menggerakkan hati pemerintah untuk menata ulang kawasan Malioboro agar lebih rapi, aman dan memiliki ruang gerak untuk para wisatawan yang ingin berjalan-jalan menikmati suasana Malioboro Nathania DP (2023:85).

Keberadaan PKL di dalam Kawasan wisata Malioboro mengalami sedikit persoalan, menyusul kebijakan pemerintah yang merelokasi para PKL tersebut ke sebuah tempat baru yaitu Teras Malioboro. Mengutip dari [Tempo.co](https://www.tempo.co), kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang merelokasi PKL ke Teras Malioboro memiliki empat alasan mendasar. *Alasan pertama*, Sultan HB X sudah lama menanti momentum yang tepat untuk menata Kawasan Malioboro dari ujung utara hingga selatan sebagai jalur pedestrian. *Kedua*, upaya relokasi PKL dari Kawasan Malioboro sudah tidak dapat dihindari karena penempatan lokasi tersebut oleh PKL tidak sesuai dengan peruntukannya. *Ketiga*, Sultan HB X mengungkapkan bahwa alasan pemindahan PKL tersebut bertujuan untuk mengembangkan kawasan pejalan kaki yang berkualitas di Kawasan Malioboro serta membuka aksesibilitas

jalan Malioboro dan jalan Margomulya sebagai pusat pelayan kota. *Keempat*, relokasi besar-besaran PKL ke Teras Malioboro merupakan tindak lanjut dari upaya Kerjasama pemda DIY dengan UNESCO. Yogyakarta sedang dalam upaya mengusulkan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia ke UNESCO. Kawasan Sumbu Filosofi ini sendiri merupakan garis imajiner lurus yang menyambungkan Tugu-Kraton-Panggung Krapyak, termasuk juga Malioboro di dalamnya.

Implementasi kebijakan penataan Malioboro berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang mengatur rencana detail tata ruang kawasan Malioboro yang akan dijadikan kawasan pedestrian. Konsep Penataan dan Pembangunan Kawasan Malioboro dengan menggunakan Konsep Teras Budaya. Konsep Teras Budaya merupakan upaya mempermudah pengunjung saat berada di Malioboro. Dalam hal ini konsep ini ingin mewujudkan Malioboro sebagai ruang non-motorize yang berorientasi kepada pejalan kaki. Konsep transportasi yang digunakan adalah transportasi lokal sebagai media utama mengakses Malioboro seperti becak dan andong. Untuk mewujudkan pedestrian diperlukan pengadaan *Street Furniture* dan lansekap/pertamanan yang menunjang pedestrianisasi.

Pemerintah Daerah memaksimalkan fungsi pedestrian sebagai ruang pejalan kaki dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya sepanjang jalan Malioboro. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima atau revitalisasi pembangunan kawasan Malioboro adalah

faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yaitu terkait dengan alokasi anggaran. Sedangkan faktor birokrasi dalam penataan kawasan Malioboro sudah terkoordinasi dengan baik dimana pemerintah Kota dan Pemerintah DIY sebagai pembangunan fisik (Tarigan, 2018:1).

Mengutip dari [Kompas.com](https://www.kompas.com), adapun lokasi yang menjadi tempat relokasi pedagang kaki lima merupakan sebuah gedung bekas bioskop Indra di kawasan selatan Malioboro sebagai Teras 1 Malioboro, kemudian lahan kosong bekas kompleks kantor dinas pariwisata di Kawasan utara Malioboro sebagai Teras 2 Malioboro. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2022 pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Malioboro diarahkan untuk pindah ke lokasi yang sudah di sediakan. Meski pada saat itu banyak pedagang yang enggan untuk pindah ke lokasi baru tetapi, pemerintah kota Yogyakarta menegaskan bahwa batas relokasi hanya sampai tanggal 7 Februari 2022 dan jika masih ada pedagang kaki lima yang masih berjualan di sepanjang jalan Malioboro, maka pemerintah akan memberlakukan aturan bagi pedagang yang enggan untuk pindah.

Dalam proses penataan kawasan malioboro tentu tidak selamanya berjalan dengan mulus atau sesuai dengan proses-proses yang diinginkan, penataan kawasan Malioboro telah lama menjadi agenda pemerintah daerah dalam merelokasi PKL. Sosialisasi telah dilakukan sejak Tahun 2015, namun relokasi PKL baru terlaksana pada bulan Januari tahun 2022. Pro dan kontra dalam relokasi tersebut muncul, mengingat hal tersebut dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Sala satu penolakan terhadap relokasi datang dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Yogyakarta

(APKLY), Penolakan ini dilakukan atas dasar rasa khawatir para PKL terhadap situasi baru lokasi berjualan yang dirasa akan mengurangi pendapatan.

Melalui pengurus APKLY (asosiasi pedagang kaki lima Yogyakarta) dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com) menyatakan bahwa “kami baru saja merasakan kebangkitan setelah pandemi akibat kebijakan-kebijakan selama pandemi, namun para pedagang harus digusur dipindahkan di tempat baru dengan situasi baru. Para PKL di Malioboro ini khawatir barang dagangannya tidak laku karena tidak lagi berada di sepanjang tepi Jalan Malioboro. Sejauh ini para PKL di Malioboro dapat menjalankan kegiatannya dengan harmonis dan tidak merugikan elemen lainnya”. Pihaknya juga telah melaksanakan kebijakan untuk mempercantik kawasan Malioboro, di sisi lain pemerintah sendiri berupaya menata kawasan Malioboro dalam rangka pengajuan ke UNESCO sebagai warisan dunia. Namun, para PKL ini merasa kebijakan ini terlalu tergesa-gesa dan kurangnya informasi secara ekonomi tidak ada jaminan pendapatan akan mendapat yang sama atau tidak. Dalam penolakannya APKLY mengajukan permohonan agar ditata saja tanpa memindah. Sehingga ada slogan “*ditata yes digusur no*”.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta dengan merelokasi PKL ke Teras malioboro tentunya menimbulkan dampak pada kesejahteraan PKL itu sendiri. Baik itu dari aspek ekonomi, politik, sosial maupun hukum. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pembangunan Teras Malioboro Terhadap Kesejahteraan PKL” untuk mengetahui apakah relokasi PKL ke teras Malioboro berdampak langsung terhadap kesejahteraan PKL terkait atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana Dampak Pembangunan Teras Malioboro Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima”

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Pembangunan Teras Malioboro Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Manfaat penelitian

a. Secara Akademis

1) Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap perkembangan pada bidang pembangunan sosial, utamanya pada perlindungan terhadap masyarakat ekonomi kecil.

2) Penelitian tersebut dijadikan acuan penelitian selanjutnya

b. Secara praktis

Penelitian tersebut diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan peneliti ke depan dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan judul/fokus penelitian.

D. Kerangka Teori

1. Pembangunan

a). Pengertian pembangunan

Dalam KBBI Pembangunan diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan membangun. Menurut Siagian (2008:31), Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Sondang P. Siagian mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan dalam usaha bangsa.

Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Perubahan dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya melalui pembangunan fisik. Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan..

Contoh dari pembangunan fisik meliputi;

- a). Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- b). Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.

c). Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan fisik lebih merujuk pada infrastruktur. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, infrastruktur yaitu fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem, infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. (Kodoatie dalam Kodrat, R. 2023) Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 membagi jenis infrastruktur menjadi:

- 1) Insfrastruktur transportasi
- 2) Insfrastruktur sumber daya air dan irigasi
- 3) Insfrastruktur jalan
- 4) Insfrastruktur air minum
- 5) Insfrakstruktur sistem pengolahan air limbah terpusat
- 6) Insfrakstruktur sistem pengolahan air limbah setempat
- 7) Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun
- 8) Insfrastruktur telekomunikasi dan informatika
- 9) Insfrastruktur ketenagakelistrikan
- 10) Insfrastruktur minyak bumi dan gas dan energi terbarukan termasuk bio energi
- 11) Insfrastruktur konservasi energi
- 12) Insfrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan
- 13) Infracstruktur fasilitas Pendidikan, penelitian dan pengembangan
- 14) Insfrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kesenian dan budaya
- 15) Insfrastruktur Kawasan
- 16) Insfrastruktur perumahan rakyat
- 17) Infastuktur pariwisata
- 18) Insfrastruktur Kesehatan
- 19) Insfrastruktur Lembaga permasyarakatan
- 20) Infastuktur bangunan Gedung negara

21) Infstruktur ekosistem industri

22) Infstruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

Dari segi pembangunan fisik, tujuan pembangunan Teras Malioboro adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pejalan kaki, menghormati karakter budaya daerah tersebut, dan memperbaiki tampilan visual kawasan Malioboro. Namun, dilakukannya penataan kawasan malioboro, salah satunya dengan memindahkan PKL ke tempat yang sudah di persiapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta yang dibuat khusus untuk di jadikan kawasan berjualan baru bagi PKL menjadi beban tersendiri bagi PKL yang di relokasi. Hal ini telah menimbulkan suatu keingintahuan tersendiri bagi peneliti untuk meneliti bagaimana pembangunan teras malioboro dapat mempengaruhi kesejahteraan PKL baik itu dari segi ekonomi maupun sosial.

b). Dampak Pembangunan

Dampak pembangunan mengacu pada semua perubahan atau efek yang timbul akibat dari kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau masyarakat. Pentingnya memahami dampak pembangunan adalah untuk mengidentifikasi dampak-dampak yang mungkin timbul sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mengelola dampak-dampak negatif dan memaksimalkan dampak positifnya.

Menurut Salim (1980) dampak positif dari pembangunan adalah dapat meningkatkan kualitas hidup yang terdiri dari meningkatkan kualitas fisik, turunnya angka kematian, dan meningkatkan kesejahteraan.

Sedangkan dampak negatif dari pembangunan yaitu berkurangnya sumberdaya, pencemaran lingkungan, dan redistribusi penduduk.

Dampak positif maupun negatif yang dirasakan dari kebijakan relokasi PKL dapat ditentukan dari sudut pandang masing-masing. Dari sudut pandang pemerintah tentunya kebijakan ini membawa dampak positif yaitu kawasan jalan Malioboro menjadi lebih tertata dan angka kriminalitas juga dapat diminimalisir karena kawasan Malioboro sudah tidak sepadat sebelum para pedagang kaki lima direlokasi. Bagi para wisatawan yang memilih untuk berjalan kaki akan lebih nyaman dan memiliki ruang gerak yang lebih luas. Namun dari sudut pandang para pedagang penataan lapak dapat mempengaruhi pendapatan yang didapat. Bagi pedagang yang mendapatkan lokasi yang strategis maka akan sangat diuntungkan namun bagi pedagang yang mendapatkan lokasi yang jangkauannya kurang strategis dengan pengunjung maka omset yang didapatkan biasanya menurun. Nathania DP (2023, 86:87).

Menurut Todaro (2007:18), menyatakan bahwa “pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro dalam bukunya mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan”.

Merujuk pada konsepsi kenegaraan, tujuan akhir pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang tercantum pada sila terakhir Pancasila. Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni *pertama* ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. *Kedua* adalah tahap kesejahteraan sosial. *Ketiga* adalah tahap keadilan sosial (Kartono, Tri, Nurcholis. 2016; 1.5)

2. Kesejahteraan

Menurut Sunarti E. (2012:60) kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang mencakup aspek material dan spiritual, dengan rasa aman, moralitas, serta kedamaian batin, yang memungkinkan setiap warga negara untuk berusaha mencapai pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang terbaik bagi diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan tolak ukur bagi masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi sejahtera. Konsep sejahtera ini menggambarkan keadaan di mana individu-individu dalam masyarakat merasakan kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian. Untuk mencapai kondisi tersebut, seseorang perlu melakukan usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (aliran pendapatan) dan daya beli masyarakat. Dengan pendekatan ini, konsep kesejahteraan memiliki makna yang terbatas, karena

hanya mempertimbangkan pendapatan sebagai penanda kemakmuran ekonomi dan menganggap kesejahteraan sebagai lawan dari kemiskinan Dwi (2008:41).

Menurut Rukminto (2003) kesejahteraan adalah suatu keseluruhan usaha yang terorganisir dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya terdapat pula unsur kebijakan dan pelayanan sosial dalam arti luas yang berkaitan dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi tradisi budaya dan sebagainya.

Menurut Rambe (2004) Kesejahteraan adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, baik dalam aspek material maupun spiritual, yang didasari oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan kedamaian lahir dan batin. Hal ini memungkinkan setiap warga negara untuk aktif berusaha dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial mereka sebaik mungkin, baik untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, maupun masyarakat secara umum, sambil tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi individu.

Menurut Imron (2012,27-37) Kesejahteraan hidup masyarakat dapat dipahami sebagai kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial ini mempunyai konotasi yang bermacam-macam. Menurut Soetarso, (1980) bahwa kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Kemudian Soetarso mengabungkan pelayanan sosial dan lembaga sosial dalam pengertian

kesejahteraan sosial, yaitu sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial yang dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah bahwa dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, seseorang dianggap sejahtera, karena tingkat pemenuhan kebutuhan tersebut secara tidak langsung mencerminkan indikator kesejahteraan Pratama, dkk (2012).

Menurut Imron (2012,27-37) ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, antara lain: *pertama*, Kenaikan penghasilan secara kuantitatif. *Kedua*, Peningkatan kualitas kesehatan keluarga. *Ketiga*, Investasi ekonomi keluarga, seperti tabungan. Kemudian dalam Badan Pusat Statistik (2023) bahwa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup

Dari semua pengertian tentang kesejahteraan yang di definisikan oleh para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa kesejahteraan mencakup berbagai aspek yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek hukum yang

mana sesuai dengan konstitusi UU Republik Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam penelitian ini, pandangan yang mengintegrasikan aspek-aspek tersebut akan digunakan sebagai konsep untuk membantu peneliti dalam menganalisis dampak Pembangunan Teras Malioboro terhadap kesejahteraan PKL.

3. Pedagang kaki lima

Dalam KBBI kata pedagang kaki lima didefinisikan sebagai orang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di lantai di tepi jalan. Menurut Ruchendi, H. (2019:18) pedagang kaki lima merupakan para pengusaha yang berjualan disektor informal yang menempati trotoar atau bahu jalan. Biasanya mereka berjualan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, mainan anak-anak, atau ada juga yang menyediakan jasa.

Dalam perspektif Damsar (2002:51) mengartikan pedagang kaki lima (sektor informal) adalah individu atau kelompok yang menjalankan usaha dagangnya di tempat-tempat umum seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan sejenisnya. Mereka melakukan usaha dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan peralatan yang dapat dipindahkan dengan mudah, dibongkar pasang, serta memanfaatkan lahan fasilitas umum.

Soeryanto dalam (Saputra, R.B 2014:4) juga mendefinisikan Pedagang Kaki Lima sebagai pedagang yang menawarkan barang-barang atau jasa di tempat umum, terutama di terotoar. Mereka merupakan wirausaha yang berjiwa pejuang, berani, dan berdiri sendiri dalam usaha mereka. Pendapat lain di

ungkapkan oleh Sinambela (2022;176) menggambarkan pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal yang beroperasi dengan modal terbatas, yang fokus pada produksi dan penjualan barang-barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di masyarakat. Mereka beroperasi di tempat-tempat yang di anggap strategis dalam lingkungan informal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2006;5), seseorang pengamat dari Fakultas Hukum UNPAR, pedagang kaki lima dapat di artikan sebagai individu atau kelompok yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Mereka berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa dengan modal yang relatif kecil, baik menggunakan modal sendiri maupun modal dari pihak lain, tanpa memandang apakah mereka berjualan di lokasi yang diperbolehkan atau tidak. Istilah "kaki lima" diambil dari lebar tempat di pinggir jalan yang mencapai lima kaki (5 *feet*). Lokasi ini biasanya terletak di trotoar, depan toko, atau tepi jalan.

Pedagang kaki lima memiliki karakteristik wirausahawan yang mencangkup kemampuan untuk mencari dan menangkap peluang usaha, ketekunan, kepercayaan diri, kreatifitas dan inovasi. Mereka memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebagai berikut; Saputra, R.B (2014:5)

- a. PKL merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya kota dan sulit untuk dihilangkan.
- b. PKL dapat menjadi elemen penghias kota jika diatur dengan baik.
- c. PKL memiliki potensi untuk berkontribusi pada sektor pariwisata.

- d. PKL dapat menjadi pembentuk estetika kota bila didisain dengan baik

Karakteristik aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam ruang perkotaan dapat dijelaskan berdasarkan Saputra, R.B (2014:6) sebagai berikut:

- a. Aktivitas Usaha yang Sederhana: Usaha PKL cenderung sederhana dan tidak melibatkan sistem kerjasama yang rumit atau pembagian kerja yang kompleks.
- b. Skala Usaha Kecil: Usaha PKL memiliki skala yang relatif kecil. Modal usaha, modal kerja, dan pendapatan yang dihasilkan cenderung berada dalam kisaran yang rendah.
- c. Tidak Memiliki Izin Usaha: Sebagian besar PKL tidak memiliki izin usaha resmi. Mereka sering beroperasi tanpa izin resmi dari pihak berwenang.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, dimana penelitian kualitatif berkembang dinamis, dikembangkan berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan terbuka (open ended), analisis teks dan interpretasi tema ataupun pola. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu strategi penelitian yang di dalamnya peneliti memproduksi teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi atau interaksi tertentu yang berasal

dari pandangan, persepsi dari responden. Peneliti menjalani sejumlah tahapan pengumpulan data, dan penyaringan kategori-kategori atas informasi yang diperoleh, untuk memaksimalkan kesamaan dan perbedaan informasi (Creswell, 2014).

2. Ruang lingkup penelitian

a. Objek penelitian

Dalam KBBI objek penelitian didefinisikan sebagai benda, hal dan sebagainya yang di jadikan sasaran untuk diteliti, di perhatikan dan sebagainya. Menurut Anto Dayan (1986:21) obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian yaitu Dampak Pembangunan Teras Malioboro Terhadap Kesejahteraan PKL.

b. Fokus penelitian

fokus penelitian merupakan garis besar dari proses pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisis hasil penelitian lebih terarah. Oleh karena itu, digunakanlah indikator indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul dalam penelitian. Fokus penelitian dari Dampak Pembangunan Teras Malioboro Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima meliputi aspek Sosial, Politik, Hukum Dan Ekonomi.

3. Subjek penelitian

Subjek merupakan komponen utama dalam suatu penelitian. Subjek bisa juga disebut sebagai responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan subjek penelitian sebagai sumber data adalah sebagai berikut;

Tabel 1. 1 Subjek Penelitian

Informasi Yang Dicari	Sumber/informan	Jumlah
1. Tujuan dilakukanya pembangunan Teras Malioboro 2. Proses relokasi PKL ke Teras Malioboro 3. Dampak yang timbul setelah dilakukanya relokasi PKL ke Teras Malioboro	Perwakilan peguyuban	2
1. Tujuan dilakukanya pembangunan Teras Malioboro 2. Proses relokasi PKL dari Malioboro ke Teras malioboro 3. Dampak yang timbul setelah dilakukanya relokasi PKL ke Teras Malioboro	PKL	8
Jumlah informan		10

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulang data dalam penelitian ini di lakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

1) Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan kegiatan keseharian manusia menggunakan pancaindera sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain ovservasi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pengamatan melalui hasil kerja pancaindera. Dalam hal ini pancaindera digunakan untuk menangkap hal yang diamati, apa yang ditangkap tadi, selanjutnya dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Morissan 2017;143).

2) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interview*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung (Yusuf, A.M 2014).

3) Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan

harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, A.M 2014).

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2018;482). Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam analisis kualitatif diantaranya:

a) Reduksi Data

Prastowo (2012:244) mendefinisikan reduksi data sebagai cara melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan

cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Sementara itu, data kualitatif dapat kita sederhanakan dan kita transformasikan dalam aneka macam cara, seperti melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b) Penyajian/ Display Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sebagainya namun terkadang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga semakin mudah dipahami (Sugiyono 2018; 249).

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono 2018:252-253). Dalam penelitian ini, rumusan masalah tidak menjamin perubahan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

BAB II

DESKRIPSI UMUM TERAS MALIOBORO

A. Kondisi Teras Malioboro

1. Sejarah Berdirinya Teras Malioboro

Malioboro adalah destinasi wisata yang sangat terkenal dan menjadi tujuan utama bagi para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Jalan Malioboro merupakan bagian integral dari citra Yogyakarta yang menghubungkan titik-titik penting di kota ini, mulai dari gunung Merapi hingga pesisir Pantai Selatan. Sebagai sebuah jalan yang menghubungkan Tugu Yogyakarta dengan Keraton Yogyakarta, Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang mencari penghasilan. Keberadaan PKL di Malioboro memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan ekonomi lokal.

Namun, keberadaan PKL di sepanjang trotoar Malioboro juga memiliki dampak negatif. PKL yang berjualan disepanjang trotoar mengakibatkan penyempitan jalur yang dilalui oleh para wisatawan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Mereka juga sering meninggalkan limbah dan sampah yang merusak tata ruang kota. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penataan kawasan tersebut. Salah satu langkahnya adalah dengan merelokasi PKL ke lokasi yang telah disediakan. Langkah ini diambil dalam upaya memperindah tata ruang kota dan mengembalikan keaslian Kota Yogyakarta tanpa adanya PKL di trotoar. Selain itu, pemerintah juga

mendaftarkan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO, dengan melakukan penataan PKL sebagai salah satu agenda utamanya. Proses relokasi ini kemudian terlaksana pada tanggal 1 Februari tahun 2022.

Dibawah naungan pemerintah Kota Yogyakarta pengelolaan Teras Malioboro di lakukan secara terpisah, Teras Malioboro 1 dikelolah oleh UPT Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Dinas Koperasi dan UKM DIY kemudian untuk Teras Malioboro 2 dikelolah oleh UPT Kawasan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Yogyakarta.

Gambar 2. 1 Gedung Teras Malioboro 1 dan 2



Sumber: <https://google.com> 2024

2. Kondisi Demografis

Teras Malioboro terletak di 2 tempat berbeda, Teras 1 Malioboro terletak di jalan Margomulyo, Ngupasan, kemantren. Gondomanan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta. Sedangkan teras 2 malioboro terletak di jalan Malioboro, no. 56. Suryatamajan, kemantren. Danurejen, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta.

Gambar 2. 2 Peta lokasi teras malioboro 1 dan 2



Sumber: <https://google/maps.com> 2024

a). Jumlah Pedagang di Teras Malioboro

Tabel 2. 1 Jumlah Pedagang di Teras Malioboro

No.	Kawasan	Jumlah pedagang
1.	Teras Malioboro 1	888
2.	Teras Malioboro 2	1.040

Sumber: *Profil Teras Malioboro 2024*

Dari tabel jumlah pedagang kaki lima di atas, kita bisa mengetahui bahwa jumlah pedagang kaki lima yang berada di Teras Malioboro 1 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pedagang yang menempati Teras Malioboro 2. PKL di Teras Malioboro 2 lebih mendominasi dengan 1.040 Pedagangnya. Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa 1.040 pedagang kaki lima yang menempati Teras

Malioboro 2 merupakan pedagang sisa atau pedagang yang tidak mendapat tempat di Teras Malioboro 1.

b). Jumlah pedagang berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2. 2 jumlah pedagang berdasarkan jenis kelamin

No	Kawasan	Pedagang kaki lima		
		L	P	Jumlah
1.	Teras Malioboro 1	519	369	888

Sumber: Profil Teras Malioboro 2024

Dari tabel jumlah pedagang berdasarkan jenis kelamin di atas, kita bisa mengetahui bahwa jumlah pedagang kaki lima di teras Malioboro 1 didominasi oleh pedagang laki-laki dengan 519 dari 888 jumlah keseluruhan pedagang. Kemudian untuk kawasan Teras Malioboro 2 dari 1.040 pedagang kaki lima, dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pedagang laki-laki dan Perempuan belum diketahui persis berapa jumlah yang pasti. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kawasan Teras Malioboro 2 adalah tempat sementara atau bukan permanen yang disediakan oleh pemerintah untuk menampung pedagang kaki lima yang tidak mendapat tempat di kawasan Teras Malioboro 1, yang rencananya pedagang yang bertempat di Teras Malioboro 2 akan di relokasi lagi ke tempat yang baru yang dekat dengan kawasan Teras Malioboro 1.

c). Jumlah Pedagang Berdasarkan Peguyuban

Tabel 2. 3 Jumlah Pedagang Berdasarkan Paguyuban

No	Kawasan	Paguyuban	Jumlah
1.	Teras Malioboro 1	Pemalni	431
		PPKLY	83
		Handayani	40
		Senopati	37
		Papela basah	46
		Sosrokusumo	11
		Mataram	19
		Perwakilan	4
		Papela kering	77
		PPMS	32
		Titik 0	70
2.	Teras Malioboro 2	Tri Dharma	923
		Titik nol	61
		PPLM	67

Sumber: Profil Teras Malioboro 2024

Dari tabel jumlah pedagang berdasarkan paguyuban diatas, kita bisa mengetahui bahwa di kawasan Teras Malioboro 1 dari 11 paguyuban pedagang kaki lima yang berasal dari paguyuban PKL Malioboro Ahmad Yani (PEMALNI) sangat mendominasi dengan 431 dari 888 jumlah

keseluruhan pedagang kaki lima. Dengan jumlah sebanyak itu tidak menutup kemungkinan semua anggota peguyuban tidak mendapatkan tempat di Teras Malioboro 1. Teras Malioboro sudah di desain untuk menampung semua pedagang yang direlokasi. Kemudian di kawasan Teras Malioboro 2 kita bisa melihat bahwa peguyuban Tri Dharma mendominasi dengan 923 dari 1.040 jumlah keseluruhan pedagang di kaki lima. namun dari hasil observasi yang di lakukan penulis, ada banyak pedagang yang terdaftar di Teras Malioboro 2 namun tidak berjualan.

d). Jumlah Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

Tabel 2. 4 Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

No.	Kawasan	Jenis dagangan	Jumlah pedagang
1.	Teras Malioboro 1	Fashion and craft	640
		Oleh-oleh	72
		Kuliner	176
2.	Teras Malioboro 2	Fashion and craft	923
		Oleh-oleh	61
		Kuliner	67

Sumber: Profil Teras Malioboro 2024

Dari tabel jenis dagangan PKL, kita bisa mengetahui di Teras Malioboro 1 pedagang yang menjual fashion and craft menduduki posisi terbanyak dengan jumlah pedagang mencapai 640, hal ini sama halnya di kawasan Teras Malioboro 2 dimana jenis dagangan Fashion and Craft

mendominasi jumlah dibandingkan dengan jenis dagangan lainnya, Adapun jenis dagangan kerajinan berupa kalung gelang, tas rajut, keset kaki dan masih banyak lagi, kemudian untuk fashion seperti baju, celana, topi kaca mata serta aksesoris dan masih banyak lagi jenisnya.

B. Sarana Dan Prasarana

Untuk menunjang keamanan dan kenyamanan para pengunjung Teras Malioboro 1 dan 2 baik itu dari kalangan wisatawan lokal maupun internasional, tentunya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Berikut merupakan sarana dan prasarana di Teras Malioboro 1 dan 2

1. Lift

Sarana dan prasarana yang ada di Teras Malioboro adalah lift. Namun lift tersebut hanya dimiliki di Teras Malioboro 1, hal ini karena Teras Malioboro 1 memiliki gedung dengan 3 tingkat, sehingga pemerintah membuat lift agar memudahkan pengunjung yang ingin berbelanja di lantai 2 atau 3 yang merupakan tempat khusus bagi pedagang oleh-oleh. Lain halnya dengan Teras Malioboro 2 yang didirikan di tempat yang luas sehingga tidak membutuhkan fasilitas seperti lift. Lift ini juga dapat membantu pengunjung yang adalah seorang disabilitas.

2. Eskalator

Sarana dan prasarana selanjutnya adalah eskalator. Walaupun sudah memiliki lift Teras Malioboro 1 juga mempunyai eskalator, hal ini dibuat dengan maksud agar mempermudah pengunjung yang mau berbelanja ke lantai 2 atau 3.

3. Tangga

Jika ada lift dan escalator pasti ada tangga, tangga di Teras Malioboro 1 sangat membantu pengunjung yang naik menggunakan escalator namun tidak ingin turun dengan lift, tangga ini sangat berguna karena escalator di Teras Malioboro 1 hanya untuk naik saja, sehingga untuk turun pengunjung yang tidak mau menggunakan lift, maka bisa menggunakan tangga.

4. Jembatan penghubung

Gedung di Teras Malioboro 1 bukan hanya 1 saja melainkan ada 2 gedung yang terpisah, jembatan penghubung ini berada di lantai 2 gedung fashion. Jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan antara gedung fashion dan gedung kuliner. Dengan adanya jembatan tersebut mampu mempermudah pengunjung yang enggan turun ke lantai 1 untuk menuju gedung pedagang yang menjual kuliner khas Jogja.

5. Mushola

Fasilitas selanjutnya adalah Mushola, fasilitas ini sudah tersedia baik di Teras 1 ataupun teras 2, selain diperuntungkan bagi pedagang keberadaan Mushola sangat membantu pengunjung agar tidak khawatir jika berbelanja namun ingin sholat.

6. Toilet

Tidak lengkap jika tempat belanja tidak mempunyai fasilitas seperti toilet, kawasan Teras Malioboro 1 dan 2 sangat menjaga kenyamanan pengunjung hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas toilet bagi pengunjung. Namun keberadaan

toilet di Teras Malioboro 1 dan 2 belum bisa memberikan kenyamanan bagi pengunjung, hal ini karena fasilitas toilet yang sangat minim, jika pada saat hari libur otomatis pengunjung akan memenuhi kawasan Teras Malioboro 1 dan 2. Dengan pengunjung yang sangat banyak tentu tidak akan bisa menampung pengunjung yang ingin memakai fasilitas tersebut.

7. Tempat duduk

Fasilitas selanjutnya adalah tempat duduk, fasilitas ini dibuat agar membantu pengunjung yang ingin menikmati kuliner khas Jogja tanpa harus di bawa pulang. Namun dengan adanya fasilitas seperti ini pengunjung yang ingin menikmati kuliner Jogja bisa merasakan langsung di tempat dengan aman dan nyaman. fasilitas ini tersedia di baik di Teras Malioboro 1 ataupun 2.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis data merupakan salah satu cara dalam memproses data yang telah penulis peroleh dari sebuah penelitian selama di lapangan. Pemrosesan dimaksudkan untuk membuktikan keterangan empiris yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian lapangan agar kemudian mendapatkan suatu gambaran dan pemahaman terkait Dampak Pembangunan Teras Malioboro Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima.

Pada bagian ini memuat mengenai analisis data hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode observasi dan wawancara sebagai metode utama, serta metode dokumentasi sebagai pendukung metode utama.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga informan yang dipilih adalah benar-benar informan yang dapat membantu peneliti dalam menjelaskan objek yang diteliti. Maka informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 informan, yaitu 8 pedagang kaki lima dan 2 perwakilan peguyuban yang ada di TM (Teras Malioboro)

A. Identitas Informan

Informan penelitian merupakan semua orang yang berkontribusi dalam proses penyelidikan ilmiah yang dapat memberikan informasi atau data, atau mereka yang di amati selama penelitian. Data analisis diperoleh melalui penggunaan metode wawancara yang mendalam, observasi, dan pengumpulan data. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan, yang didasarkan pada pengamatan terhadap individu atau perilaku yang diamati.

Untuk mendapatkan akses bertemu informan dalam penelitian ini, dengan mengingat kembali bahwasanya informan yang akan diteliti keseluruhannya adalah pedagang kaki lima, maka peneliti melakukannya dengan membuat janji untuk wawancara. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena peneliti berusaha untuk tidak mengganggu pedagang kaki lima yang sedang berjualan. Sehingga peneliti dan informan membuat janji agar proses wawancara dilakukan pada waktu kosong informan. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 – 25 maret 2023.

1. Narasumber pertama Fauzi, berusia 42 tahun memiliki usaha angkringan TM 1 dan merupakan anggota dari Paguyuban Sosrokosumo.
2. Narasumber kedua Guslim, berusia 54 tahun, memiliki usaha aksesoris di TM 1 dan merupakan anggota dari Paguyuban Pernalni
3. Narasumber ketiga Dyanti, berusia 52 tahun, memiliki usaha berjualan Bakpia di TM 1 dan merupakan anggota Paguyuban Papela Kering

4. Narasumber keempat pak Aris, berusia 53 tahun, memiliki usaha berjualan kaos, celana dan tas di TM 1 dan merupakan anggota Paguyuban Pernalni
5. Narasumber kelima Edi, berusia 45 tahun, memiliki usaha berjualan aksesoris di TM 2 dan merupakan anggota Paguyuban Titik 0.
6. Narasumber keenam Jaswadi berusia 55 tahun, memiliki usaha lesehan di TM 2 dan merupakan anggota Paguyuban PPLM
7. Narasumber ketujuh Hadianto berusia 36 tahun, memiliki usaha berjualan kaos dan celana di TM 2 dan merupakan anggota dari Paguyuban Tri Dharma
8. Narasumber kedelapan Anwar berusia 37 tahun, memiliki usaha berjualan batik di TM dua dan merupakan anggota dari Paguyuban Tri Dharma.
9. Narasumber kesembilan Slamet berusia 52 tahun, merupakan Ketua Paguyuban Pernalni di TM 1 dan juga memiliki usaha berjualan pakaian adat Yogyakarta.
10. Narasumber kesepuluh Sito berusia 51 tahun, merupakan ketua Paguyuban Pedagang Makan Siang (PPMS) di TM 1.

B. Analisis Dan Pembahasan

Dalam proses penelitian yang berlangsung pada tanggal 10 – 25 Maret 2024, peneliti cukup banyak mendapatkan informasi tentang Dampak Pembangunan Teras Malioboro Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kali Lima.

1. Aspek Sosial

Aspek sosial mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia yang bersifat sosial, seperti pola-pola perilaku, interaksi antara individu, pembentukan kelompok sosial, dan proses perubahan sosial. Ini juga melibatkan pengakuan terhadap identitas sosial individu dalam konteks masyarakat tertentu. Dalam banyak kasus, aspek sosial melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu dan kelompok saling memengaruhi, bekerja sama, atau bertentangan satu sama lain dalam mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan mereka. Apa yang dialami beberapa PKL di Teras Malioboro merupakan suatu bentuk dari relasi sosial yang buruk, dalam penelitian di Teras Malioboro peneliti menemukan dua factor yang membuat relasi sosial di kalangan PKL memburuk.

a. Perubahan Relasi Sosial

1) Komunikasi PKL dan pelanggan menurun

Dampak terhadap perpindahan tempat berjualan sangat mempengaruhi hubungan komunikasi PKL dan pelanggan, kondisi kehilangan pelanggan yang yang dirasakan oleh PKL di Teras Malioboro menunjukkan betapa dampak relokasi juga mempengaruhi

hubungan sosial antara pedagang dan pelanggan. Dalam wawancara bersama Aris, beliau menyampaikan bahwa

Kalau disana dulu saya sering berkomunikasi dengan pembeli ada juga beberapa orang yang menjadi langganan saya. Kalau disana itu enak semua pengunjung pasti lewat depan dagangan saya jadi saya bisa menawarkan begitu. Tetapi sekarang kalau yang saya lihat kadang banyak pembeli itu datang langsung ke tempat tujuan mereka, misalnya ke lantai 1 saja. Jadi saya yang dilantai 2 tidak sempat sekedar menawarkan begitu (Aris. 22-03-24).

Demikian pula dalam wawancara bersama Anwar, beliau menyampaikan bahwa Setelah pindah kesini saya merasa kehilangan koneksi dengan pelanggan saya sebelumnya, dulu di tempat sebelumnya saya mempunyai beberapa pelanggan yang saya kenal baik. Tetapi setelah saya pindah kesini saya kehilangan komunikasi dengan mereka. Mungkin karena mereka belum mengetahui bahwa saya sudah dipindahkan ke sini. Itu menurut saya (Anwar 24-03-24).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pedagang Jaswadi, beliau menambahkan bahwa Disini saya jarang berkomunikasi dengan pengunjung yah palingan saya hanya berkomunikasi dengan sesama pedagang lainnya saja. Ini terjadi karena lapak saya ini jarang didatangi pengunjung, beda dengan sebelum disini. sehingga saya juga jadi jarang membuka lapak saya ini mas (Jaswadi. 24-03-24).

Dari jawaban ketiga narasumber diatas peneliti menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan hubungan interaksi sosial PKL dan pelanggan adalah akibat dari relokasi yang dilakukan kepada PKL. Kehilangan komunikasi dengan pelanggan menyebabkan masalah yang merambat luas terutama pada aspek ekonomi PKL. Dalam kehidupan sehari-hari interaksi sosial antara sesama manusia sangat diperlukan agar tetap menjaga hubungan tetap harmonis.

2) Hubungan antara PKL merengang

Situasi yang dialami PKL di Teras Malioboro merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi mereka, dampak relokasi yang sangat

merugikan PKL merambat pada kekompakan antara PKL. Dalam wawancara bersama Dyanti seorang pedagang bakpia basah di Teras Malioboro 1, beliau mengungkapkan bahwa

Kalau di tempat saya dahulu itu misalnya jika ada yang mengajak ketemu orang sakit itu sama-sama, pokoknya kekompakan itu terjaga dengan baiklah. Tapi kalau sekarang kebanyakan mengurus hidup masing-masing, soalnya harus mencari penghasilan tambahan untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari mas begitu. nyari uang sekarang itu susah mas ditempat baru seperti ini. kalau dulu saling bahu-membahu sekarang sudah induvidu, urus masing-masing (Dyanti. 22-03-24).

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber diatas mengungkapkan betapa relokasi sangat mempengaruhi kekompakan antara sesama pedagang, relokasi mampu membalik keadaan yang sebelumnya PKL saling bahu membahu antara sesama pedagang menjadi terlihat asing karena harus mencari penghasilan tambahan untuk membiayai hidup.

3) Kerja sama sosial

Merujuk pada kondisi ekonomi setiap PKL yang mengalami penurunan yang sangat signifikan tentu memunculkan niat saling merangkul yang kuat antara sesama. Dalam wawancara bersama ketua peguyuban Pemalni, beliau menyatakan bahwa

kondisi ekonomi yang melemah tidak membuat hubungan sosial antara anggota-anggota saya merenggang, untuk menjaga hubungan sosial agar tetap kuat antara sesama pedagang, itu teman-teman pedagang melakukan hal semacam iuran. Itu dikumpulkan uang Rp.1.000 kemudian uang tersebut digunakan untuk membantu sesama pedagang, misalnya ada yang sakit dan masuk rumah sakit, jadi kami bisa gunakan uang itu. (Slamet. 18-03-24).

Pernyataan dari ketua peguyuban Pemalni kemudian dibenarkan oleh pak Guslim yang merupakan anggota peguyuban Pemalni, beliau menambahkan

kami disini sesama anggota peguyuban mengumpulkan uang iuran untuk berjaga-jaga jika suatu saat ada dari anggota kami yang mengalami musibah (Guslim. 13-03-24).

Pernyataan yang disampaikan oleh kedua narasumber diatas menunjukkan bahwasanya Peguyuban Pemalni telah menjalankan praktik pengumpulan uang iuran sebagai bentuk dukungan dan perlindungan sosial di antara sesama pedagang. Uang iuran yang terkumpul digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah, seperti sakit parah atau masuk rumah sakit. Tindakan ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya saling mendukung dan bertanggung jawab satu sama lain di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Hal ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial yang mendalam dalam komunitas pedagang seperti peguyuban Pemalni. Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi yang berat, mereka tetap bertahan dan saling memberi dukungan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bersama.

b. Perubahan budaya berjualan

PKL menjadi pasif dalam berjualan

Dalam berjualan tentu setiap PKL mempunyai strategi tersendiri agar mampu menarik minat pembeli, strategi-strategi tersebut menjadi sesuatu yang khas dan melekat pada diri PKL tersebut. Dalam wawancara

bersama Fauzi seorang pedagang angkringan, beliau menyampaikan bahwa

Jualan di depan dulu itu saya membua pembeli itu seperti jual premium, itu seperti jika ada yang memesan minuman kepada saya, saya akan mengantar langsung kepemesanya sehingga mereka tidak perlu menunggu saya sampai selesai membuat minuman itu. Sementara kalau disini lain lagi, saya harus menunggu pembeli datang membeli dan minumnya disini juga. (Fauzi. 13-03-24).

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber diatas bahwa pengaruh relokasi membuat budaya berjualan dari PKL berubah, dimana keadaan sebelumnya PKL lebih mendominasi dalam berjualan menjadi pasif karena kondisi tempat yang tidak sesuai dengan strategi PKL. Relokasi ini memang menawarkan tempat yang lebih nyaman dibandingkan sebelumnya namun, PKL harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lokasi yang baru agar tetap bisa berjualan.

Dalam wawancara bersama ketua peguyuban PPMS beliau menyampaikan bahwa

pada konteksnya kami disini bukan pembisnis, kita disinikan karena berjualan di dekat tempat destinasi wisata. Sehingga kita mengambil konteks itu sebagai pelayan bukan pebisnis, kita melayani wisatawan sebagai tamu kehormatan kita, tamu yang membawa rejeki kita tanpa ada wisatawan kita tidak bisa apa-apa. Sehingga kami dengan semaksimal mungkin mensosialisasikan kepada sesama pedagang bahwa kita disini sebagai pelayan bukan pebisnis walaupun secara tidak langsung kami menggunakan metode berjualan. (Sito.24-03-24).

Pernyataan yang diungkapkan oleh ketua peguyuban PPMS adalah sala satu bentuk perubahan budaya yang dialami PKL, dimana sebelumnya mereka adalah seorang pebisnis yang mangantungkan penghasilan dari berdagang kemudian setelah dilakukanya relokasi konteks tersebut berubah menjadi sebagai pelayan bagi wisatawan yang

berkunjung ke Teras malioboro walaupun cara PKL melayani wisatawan yaitu dengan berjualan.

c. Akses fasilitas

Tempat yang nyaman dalam berjualan

Selain biaya sewa tempat yang gratis Teras Malioboro juga memberikan fasilitas yang memadai bagi PKL untuk berjualan, tempat yang didapatkan oleh PKL tentu sangat nyaman sekali untuk berjualan, berbeda dari tempat sebelumnya dimana PKL berjejeran di sepanjang jalan malioboro yang mengakibatkan akses untuk pedestrian mengalami penyempitan. Selain tempat berjualan yang nyaman, fasilitas-fasilitas umum juga diberikan seperti mushola, tempat duduk bagi pelanggan dan toilet.

Dalam wawancara bersama pak Edi seorang pedagang aksesoris, beliau menyampaikan bahwa memindahkan kami ke sini menurut saya sangat baik, karena disini kami mendapatkan tempat yang nyaman untuk berjualan. sebelum di sini dulu kami kalau berjualan di kawasan Malioboro, lumayan repot juga karena harus bongkar pasang dagangan. Beda lagi kalau di sini selain tempatnya yang sudah legal, jika datang hujan kami tidak perlu takut lagi seperti di tempat sebelumnya. ya menurut saya baguslah di sini (Edi. 24-0324).

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Hadianto, beliau menyampaikan bahwa fasilitas yang ada disini lumayan baik, kami diberikan mushola juga toilet, jika ada hujan juga kami tidak khawatir lagi karena sudah dilengkapi dengan atap yang kokoh (Hadianto. 23-03-24).

Dari pernyataan yang diberikan oleh kedua narasumber diatas kita bisa mengetahui bahwa relokasi PKL bukan hanya sekedar relokasi biasa, tetapi pemerintah dalam programnya juga memberikan kenyamanan yang berbeda dari tempat PKL berjualan sebelumnya.

Segalah jenis fasilitas dibuat agar PKL bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

2. Aspek Politik

Relokasi PKL dapat memengaruhi hubungan antara pemerintah lokal dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pedagang, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah harus memperhatikan bagaimana keputusan relokasi tersebut akan memengaruhi dukungan politik dari pemangku kepentingan tersebut.

a. Partisipasi dan keterlibatan

Ikut serta mengambil keputusan relokasi

Partisipasi PKL dalam proses pengambilan keputusan relokasi sangat penting secara politik, Karena keterlibatan publik dalam konsultasi, dialog, dan pengambilan keputusan akan membantu membangun legitimasi politik untuk tindakan relokasi tersebut. Ketika PKL merasa didengarkan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat mengurangi ketegangan politik dan meningkatkan dukungan untuk relokasi.

Dalam wawancara bersama ketua peguyuban Pemalni beliau menyampaikan bahwa tentu saya terlibat dalam pengambilan keputusan karena posisi saya yang sebagai ketua, saya yang mewakili teman-anggota dalam proses sosialisasi. Kemudian saya juga mensosialisasikan kepada teman-teman agar mereka mengetahui bahwa relokasi ini arah kedepannya seperti apa. Jadi kita mengambil keputusan itu secara bersama-sama melalui forum komunikasi untuk mengerti mana yang terbaik (Slamet, 18-03-24).

Pernyataan dari ketua peguyuban pemalni kemudian dibenarkan oleh Aris dan Guslim yang merupakan anggota peguyuban Pemalni, mereka mengatakan proses pengambilan keputusan kemarin itu sudah diwakili oleh pengurus, jadi saya mengetahui semua hal tentang relokasi itu melalui pengurus (Aris, Guslim 22-03-24). Hal yang sama juga disampaikan oleh pak Edi, beliau menyampaikan bahwa terkait pengambilan keputusan relokasi itu, kami diwakilkan oleh pengurus saja, jadi kami hanya menerima hasil keputusan dari mereka saja (Edi 24-03-24)).

Pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber diatas menunjukkan bahwa partisipasi pengurus dalam pengambilan keputusan relokasi memberikan kesempatan bagi mereka agar bisa menerangkan dengan jelas kepada anggota-anggotanya tentang relokasi termasuk tujuan, manfaat, dan dampaknya. Ini dapat meningkatkan kesadaran PKL tentang isu-isu yang terkait dengan relokasi dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara lebih efektif dalam proses tersebut.

Dalam proses pengambilan keputusan relokasi tentu tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, terjadi pro kontra sampai pada penolakan karena PKL merasa kebijakan tersebut akan merugikan PKL. Namun wacana penataan Kawasan malioboro bukan sebuah wacana yang baru, tetapi rencana ini sudah di wacanakan sejak tahun 2014, dalam wawancara bersama ketua Peguyuban PPMS, beliau menyatakan bahwa

Untuk penataan Kawasan malioboro sudah terwacana dari tahun 2014 itu mengenai penataan pedestrian. Kemudian di tahun 2016 baru terlaksana. Itu menata kawasan parkir malioboro menjadi Kawasan pedestrian. Kemudian untuk sosialisasi terkait relokasi ini juga ada, kemudian namanya sosialisai tidak semuanya itu diterima ada pro kontra sampai pada penolakan ada tetapi khusus untuk saya

dan anggota saya, itu saya pahami kalau nanti ditempat baru itu seperti ini, kondisinya seperti ini dan lain-lain saya terangkan kepada anggota saya (Sito.24-03-24). Pernyataan yang dijelaskan oleh ketua peguyuban PPMS kemudian disampaikan juga oleh pak Jaswadi, beliau menyatakan bahwa kami menyerakan sepenuhnya kepada pengurus, jadi apa yang di sampaikan dan di perjuangkan oleh pengurus kami tetap dukung (Jaswadi. 24-03-24).

b. Asas Keadilan

1) Ketidakpuasaan terhadap keputusan relokasi

Ketidakpuasaan yang diterima oleh para pedagang kaki lima mengenai relokasi mereka bisa menjadi masalah serius. Ini bisa mengakibatkan ketidakpastian, kebingungan yang dapat mempengaruhi mata pencahariannya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi terkait keputusan relokasi mungkin masih ada PKL yang tidak memiliki akses yang memadai ke media atau sumber informasi lainnya. Mereka mungkin tidak terhubung dengan internet atau tidak memiliki akses ke saluran komunikasi formal lainnya, seperti papan pengumuman dan lainnya.

Dalam wawancara bersama pak Fauzi, beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya masyarakat bawah itu tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan relokasi, saya sendiri menerima informasi terkait relokasi itu medadak sekitar seminggu sebelum pemindahan pokoknya pas sudah dekat-dekat mau pemindahan itu baru di kasitau bahwa kita harus pindah kesana. Jadi untuk proses pengambilan keputusan itu untuk masuarakat bawah tidak ada sama sekali masyarakat bawah itu tau, mungkin itu prosesnya dari pemerintah. (Fauzi, 13-03-24).

Kemudian hal yang sama juga disampaikan juga oleh pak Hadianto, beliau menambahkan bahwa untuk proses pengambilan keputusan itu kalau dibilang terlibat ya memang terlibat, tetapi informasinya mengenai detail-detail terkait relokasi itu tidak sepenuhnya kita tau (Hadianto.23-03-24).

Kesimpulan yang bisa diambil dari pernyataan kedua narasumber diatas adalah keduanya mengungkapkan bahwa masyarakat bawah tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait relokasi, mereka hanya diberi informasi yang mendadak beberapa waktu sebelum relokasi itu dilakukan, kemudian ada yang mengikuti namun PKL masih merasa tidak puas karena tidak sepenuhnya tau. Hal ini menunjukkan perlunya transparansi dan partisipasi PKL dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah ketidakpastian dan ketidakpuasan bagi yang terdampak.

2) Pembagian tempat melalui pengundian

Pembagian tempat bagi PKL yang direlokasi ke Teras Malioboro 2 melalui pengundian adalah salah satu metode yang digunakan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada PKL untuk mendapatkan tempat berjualan yang baru setelah di pindahkan. Hal ini dikonfirmasi dalam wawancara bersama pak Anwar, beliau mengungkapkan bahwa

sehari sebelum dipindahkan kesini kami melakukan pengundian terlebih dahulu untuk mendapatkan posisi lapak yang akan kami tempatkan (Anwar. 24-03-24). Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Dyanti, beliau menyampaikan bahwa kalau di tempat saya itu menggunakan sistem mengambil lotre untuk menentukan saya dapat tempat nomor berapa, kalau bukan anggota peguyuban berarti tidak dapat tempat (Dyanti 22-03-24)).

Kesimpulan dari kedua pernyataan narasumber diatas ialah melalui pengundian PKL bisa mendapatkan kesempatan yang adil

dalam mendapatkan tempat berjualan. Dalam konteks ini, keadilan distributif terwujud karena setiap PKL memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan tempat berjualan yang diinginkan, tanpa adanya preferensi atau keuntungan yang diberikan kepada pihak tertentu. Selain itu, pengundian juga dapat mengurangi konflik dan ketidakpuasan di antara PKL yang bersaing untuk mendapatkan tempat berjualan, karena hasilnya didasarkan melalui pengundian.

Namun meskipun metode pengundian memiliki kelebihan dalam memastikan keadilan distributif, namun mungkin juga memiliki kelemahan seperti misalnya ada PKL yang merasa tidak puas dengan hasil pengundian jika mereka mendapatkan lokasi yang tidak diinginkan dan dianggap kurang menguntungkan jika mereka menempati tempat tersebut.

3. Aspek Hukum

Relokasi PKL di Teras Malioboro adalah kebijakan pemerintah atau otoritas setempat untuk memindahkan pedagang kaki lima dari Kawasan Malioboro ke lokasi yang sudah ditentukan yaitu Teras 1 dan Teras 2, dalam rangka menata kawasan Malioboro yang sudah menjadi sumbu filosofi. Kebijakan relokasi ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Istimewah Yogyakarta dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY 2019-2039 dan termuat juga dalam Surat Edaran Gubernur DIY No. 3/SE/1/2022 Tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian Di Jalan Malioboro Dan Margo Mulyo, dan

Dan Durat Edaran Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta No. 430/1.131/SE.Disbud/2022 tentang pelaksanaan penataan kawasan khusus pedestrian di jalan Malioboro dan Margomulyo, Semua Jenis PKL Dilarang Beroperasi Di Kawasan Tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Yogyakarta merupakan sebuah kebijakan yang sudah dipertimbangkan sebagaimana sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati bersama. Adapun hal-hal yang peneliti bisa paparkan terkait kerugian dan manfaat yang dirasakan secara langsung bagi kelangsungan bisnis PKL.

a. Akses Perlindungan

1) Legalitas PKL

Legalitas merujuk pada kelayakan atau keabsahan suatu Tindakan atau keadaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Legalitas juga mencakup keabsahan dokumen, transaksi atau kegiatan berdasarkan hukum. Dengan mendapatkan legalitas, seseorang atau kelompok dapat memastikan bahwa Tindakan mereka tidak melanggar hukum dan memiliki dasar yang sah dalam sistem hukum yang berlaku.

Kita mengetahui bersama bahwa PKL Kawasan malioboro sebelum relokasi ke Teras Malioboro belum memiliki izin legal untuk berjualan di sepanjang Kawasan Malioboro terutama bagi PKL yang berjualan di Kawasan pedestrian. Dalam wawancara bersama Ketua peguyuban PPMS, beliau menceritakan bahwa

Di selasar malioboro itu kita bisa dikatakan liar bisa juga dikatakan resmi karena kita juga dinaungi oleh Perda, tetapi kita disitu memanfaatkan lahan yang bukan milik PKL. Itu kan trotoar untuk pejalan kaki. Kitakan sifatnya hanya diakui masyarakat kalau ada PKL di kawasan Malioboro, kalau sekarang kita resmi dan punya legalitas dalam berjualan (Sito, 24-03-24).

Pernyataan dari ketua peguyuban PPMS kemudian dibenarkan dalam wawancara bersama Guslim dan Aris, mereka menyebutkan bahwa faktanya PKL yang sebelumnya berjualan di kawasan Maliobro merupakan illegal. Karena memanfaatkan kawasan yang dipergunakan untuk pejalan kaki tanpa izin dari pemerintah untuk berjualan. Sehingga pemerintah kemudian merelokasi semua PKL ke tempat yang sudah disediakan (Guslim, Aris, 22-03-24).

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber diatas menunjukkan aktivitas berjualan PKL sebelumnya tidak sesuai dengan regulasi dan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Seperti yang digambarkan oleh ketua pagyuban PPMS bahwa keberadaan PKL sebelumnya dapat dianggap “liar”, karena mereka memanfaatkan lahan milik pedestrian. Namun dengan relokasi PKL ke Teras Malioboro 1 dan 2 PKL merasa “resmi” karena memiliki legalitas dalam berjualan. Hasil akhir yang diteima oleh PKL adalah keuntungan dalam hal legalitas dalam berjualan, hal ini menunjukkan pentingnya peran regulasi dan dukungan dari pemerintah dalam membantu memastikan legalitas kegiatan ekonomi PKL.

2) Keamanan

Faktor kemanan menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam sebuah relokasi, faktor keamanan juga bisa menjadi suatu yang harus dipertanyakan oleh PKL kepada pemerintah. Keamanan yang dimaksud disini adalah keamanan fisik, lokasi baru untuk PKL apakah dapat menjamin hal-hal seperti perampokan, pencurian atau tindakan kekerasan, tempat yang bagus akan otomatis menjamin keamanan baik untuk PKL maupun pelanggan dan komunitas sekitar.

Dalam sebuah wawancara bersama pak Fauzi dan ibu Dyanti mereka menyampaikan bahwasanya keamanan di Teras malioboro 1 sangat terjamin, hal tersebut dibuktikan oleh keberadaan penjaga yang selalu memantau di depan pintu masuk gedung, selain itu gedung di Teras Malioboro juga dilengkapi dengan CCTV sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang dapat merugikan PKL dan pengunjung (Fauzi, 13-03-24, Dyanti 22-03-24). Demikian pula yang disampaikan oleh ketua peguyuban Pemalni bahwa selama disini masih aman-aman saja, belum pernah saya menerima laporan terkait masalah seperti kehilangan dan lain-lain dari anggota saya (Slamet 18-03-24).

3) Regulasi yang jelas

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah akan menciptakan regulasi yang jelas bagi PKL, seperti jam operasional yang diizinkan oleh pemerintah. Dengan regulasi yang jelas akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memungkinkan PKL untuk beroperasi dengan lebih teratur.

Dalam wawancara bersama Jaswadi, beliau mengatakan bahwa untuk jam operasional yang diberikan oleh pemerintah itu masih sama seperti dulu di tempat sebelumnya, yaitu kami di Teras malioboro 1 ini berjualan senin sampai minggu, sementara untuk

jam buka itu dari jam 06;00 pagi sampai jam 23;30 malam (Jaswadi 24-03-24). Terdapat perbedaan jam operasional antara Teras Malioboro 1 dan Teras malioboro 2, hal ini diketahui dari jawaban Pak Edi di Teras Malioboro 2, beliau mengatakan bahwa untuk jadwal operasional disini dari hari senin sampai hari minggu, kemudian untuk waktu operasionalnya dari pemerintah diberikan waktu 24 jam, tetapi saya disini sampai sore saja bukannya (Edi 24-03-24).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh kedua narasumber diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Teras Malioboro 1 dan 2 memiliki konsistensi terhadap jam operasional, hal tersebut ditunjukkan dari jadwal operasional Teras Malioboro 1 dan 2 dibuka setiap hari. Kemudian kedua lokasi tersebut memiliki perbedaan jam operasional dimana Teras Malioboro 1 dibuka selama 18 jam yaitu dari jam 06;00 pagi sampai jam 23;00 malam. Sedangkan untuk Teras Malioboro 2 pemerintah memberikan waktu 24 jam bagi PKL untuk berjualan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa walaupun jam buka Teras Malioboro 1 dimulai jam 06;00 pagi namun, PKL tidak semuanya buka di jam tersebut. Sebagian besar PKL mulai buka di jam 07:00 sampai jam 10:00 pagi. untuk Teras Malioboro 2 sendiri hampir sama seperti di Teras Malioboro 1 dimana waktu yang diberikan itu selama 24 jam namun tidak semua PKL berjualan selama itu di Teras Malioboro 2, seperti yang diungkapkan oleh Edi bahwa beliau hanya membuka lapaknya dari pagi sampai sore saja.

b. Ketidakadilan

Pelaksanaan relokasi

Setelah melewati proses pengambilan keputusan relokasi yang menimbulkan berbagai penolakan dari kalangan PKL, tepatnya pada tanggal 1 februari 2022 relokasi PKL terlaksana dan dilakukan secara serentak baik itu PKL di teras malioboro 1 atau 2. Proses relokasi ini kemudian ditanggap oleh beberapa PKL sebagai sesuatu proses yang terlalu terburu-buru, terutama bagi PKL yang ditempatkan di Teras Malioboro 2.

Dalam wawancara bersama mas Anwar, beliau mengungkapkan bahwa proses relokasi yang saya rasakan itu seperti dipaksakan, pada saat itu dari pihak kami sempat mengajukan penundaan tetapi tidak diterima, kami mengajukan itu karena pada saat itu di tanggal 29 januari pengundian trus tanggal 1 februari harus pindah. Itu kalau dipikir-pikir sangat tidak masuk akal mas, saya katakan tidak masuk akal karena kondisi tempat ini sebelumnya kosong tidak ada apa-apa kecuali tiang dan atap yang baru dibangun, untuk dinding-dinding pembatas ini kami sendiri. Waktu 2 hari itu sangat singkat sekali tidak cukup untuk kami bangun ini. (Anwar, 24-03-24)

Demikian juga yang disampaikan oleh mas Hadianto, beliau berpendapat kalau untuk proses relokasi itu menurut saya agak sulit mas untuk diterima selain waktunya yang mepet, hal yang tidak saya terima itu sebelumnya kami sudah kebiasaan enak, nyaman, jualan terbiasa, jadi harus kembali nol lagi untuk membuat pasar (Hadianto,23-03-24).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh kedua narasumber diatas peneliti menyimpulkan bahwa PKL membutuhkan dukungan lebih lanjut dan waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Relokasi bukan hanya sekedar memindahkan tempat berjualan, tetapi juga membutuhkan

penyesuaian terhadap lingkungan yang baru dan proses berjualan yang berbeda. Proses relokasi malioboro menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan waktu, ketidakpuasan terhadap keputusan yang dipaksakan seperti apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber diatas.

4. Aspek ekonomi

Pelaksanaan pembangunan merupakan langkah awal untuk mencapai masyarakat yang sejahterah, sala satunya sejahterah dari segi ekonomi. Pembangunan yang berhasil seringkali menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menciptakan lapangan, meningkatkan produktivitas dan membuka peluang kerja baru bagi individu dan bisnis.

Normalnya suatu pembangunan tentu membawa dampak baik terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Perlu dicatat bahwa disetiap Pembangunan juga akan membawa dampak negatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Dampak Pembangunan Teras Malioboro Terhadap Kesejahteraan PKL, peneliti menemukan bahwasanya pembangunan teras malioboro dampak negative dan positif dari pembangunan teras malioboro terhadap aspek ekonomi PKL.

a. Dampak Negatif

1) Penghasilan berkurang

Relokasi yang berarti pindah dari lokasi yang strategis dengan lalu lintas manusia yang tinggi ke lokasi yang kurang ramai. Hal ini

mengakibatkan penurunan drastis dalam hal jumlah pendapatan yang dihasilkan. Berkurangnya penghasilan menjadi salah satu masalah yang menimpah PKL di Teras malioboro 1 maupun 2. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama pak Fauzi yang merupakan pedagang angkringan di TM 1, beliau mengungkapkan bahwa

untuk dampak setelah di relokasi ke sini terus terang awalnya saya itu terjun bebas yang membuat penghasilan saya mengalami penurunan yang sangat drastis, itu sekitar turunnya sekitar 70% - 75% (Fauzi. 13-03-24).

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber di TM 2 yang merupakan pedagang kaos beliau menyampaikan bahwa yang saya alami itu berkurangnya sangat pesat mas, kalau dibandingkan disana dengan disini itu disana seminggu saya bisa dapatkan lebi dari Rp.800.000 sedangkan disini selama seminggu itu palingan di kisaran Rp.200.000 atau Rp.300.000 kalau lagi ramai bisa dapat Rp.400.000 lebih. Intinya penghasilan itu sangat turun mas (Anwar 24-03-24). Kemudian pendapat yang sama disampaikan oleh narasumber di TM 1 seorang pedagang pakian. Untuk penghasilan jelas berkurang dulu disana seminggu saya bisa mendapatkan keuntungan lebi dari Rp.1.000,000 sedangkan disini seminggu itu kisaran Rp.500.000 karena berjualan disini pelangganya sedikit kalau di tempat sebelumnya pelanggan banyak karena lalu-lalang di pinggir jalan (Aris.22-03-24).

Melihat dari apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber diatas peneliti menyimpulkan bahwa relokasi yang dilakukan terhadap PKL merupakan sebuah derita sendiri bagi PKL. Pembangunan teras malioboro dalam rangka menampung pedagang yang direlokasi tidak bisa menjamin penghasilan yang sama seperti di tempat sebelumnya, penghasilan PKL yang mengalami penurunan merupakan bukti nyata bahwasanya relokasi merupakan hal yang buruk bagi PKL, jawaban dari ketiga responden diatas menunjukkan betapa relokasi

menimbulkan masalah bagi penghasilan PKL yang awalnya baik-baik saja menjadi sangat buruk setelah dilakukan relokasi.

2) Penutupan usaha

Keadaan pelanggan yang berkurang sangat drastis dari ramai menjadi sepi membuat sebagian pedagang terutama di teras malioboro 2 menutup lapaknya, dari hasil observasi peneliti di teras malioboro 2 memang sangat tampak sekali banyak lapak pedagang yang tidak buka entah itu karena tidak masuk atau karena hal lain. Hal tersebut menimbulkan rasa penasaran bagi peneliti. Dalam wawancara Bersama pak Jaswadi seorang pedagang lesehan di TM 2, beliau mengatakan bahwa

Diawal pemindahan dulu banyak pedagang yang berjualan disini, namun lama kelamaan menghilang satu per satu. Sampai sekarang yang masih bertahan disini hanya pedagang yang berada di depan saja kalau yang dibelakang sini sudah banyak yang tutup karena tidak ada pengunjung atau pembeli yang mau kesini mas (Jaswadi. 24-03-24).

Dari respon narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa relokasi tidak hanya mengarah pada penghasilan yang menurun namun relokasi juga menyebabkan banyak PKL terutama di Teras Malioboro 2 menutup lapak mereka karena satu dan lain hal. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang bagaimana nasib PKL yang telah menutup lapaknya, apakah yang mereka lakukan untuk mencari penghasilan agar memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka?

3) Perubahan waktu kerja

Dampak negatif selanjutnya berkaitan dengan jadwal PKL dalam menjual dagangan. Dalam observasi di teras malioboro 1 peneliti menemukan lapak yang tidak dibuka namun dilapkannya masi terdapat barang dagangan yang hanya ditutupi terpal. Selain mempengaruhi penghasilan dan penutupan usaha relokasi yang dilakukan juga berdampak terhadap jam kerja PKL. Hal tersebut disebabkan beberapa PKL tidak menggantungkan penghasilan mereka pada berdagang di Teras Malioboro saja.

Dalam wawancara bersama ibu Dyanti yang merupakan seorang pedagang bakpia basah di teras malioboro 2. Beliau mengungkapkan bahwa setelah pindah ke sini saya berjualan itu dalam seminggu hanya 2x saja karena pelangganya tidak ada, kalau saya berjualan disini selama seminggu penuh itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mas, jadi saya hanya masuk 2x saja dalam seminggu. Kalau dibawah dulu banyak orang ramai jadi saya berjualan itu seminggu full (Dyanti. 22-03-24). Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh pak Hadianto, beliau mengatakan bahwa di Teras Malioboro 2 ini siapa saja pasti tau kalau disini pengunjungnya sepi bahkan sangat sepi, kalau saya menggantungkan hidup saya dengan berjualan disini terus itu saya tidak bisa mas, jadi saya untuk masuk kerja itu agak jarang kadang hanya buka di hari sabtu atau minggu saja (Hadianto. 23-03-24).

b. Dampak Positif

1) Potensi keuntungan jangka Panjang

Selain berdampak negatif bagi PKL, pembangunan Teras Malioboro juga memungkinkan untuk PKL mendapatkan keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Sekarang memang kondisi Teras Malioboro 1 maupun 2 tidak begitu baik

bagi PKL, namun perlu kita ingat bahwa Teras Malioboro baru berlangsung kurang lebih tiga tahun sehingga ada kemungkinan besar bahwa masih belum banyak wisatawan yang mengetahui lokasi teras malioboro 1 dan 2. Pengelola teras Malioboro 1 dan 2 terus berupaya agar mempromosikan Kawasan berbelanja teras malioboro, salah satunya lewat akun Instagram resmi kedua Kawasan tersebut. Beberapa PKL juga meyakini bahwa suatu saat teras malioboro akan menjadi sangat ramai dan diminati oleh para wisatawan lokal maupun internasional.

Dalam wawancara bersama pak Sito yang merupakan ketua peguyuban Pemalni sekaligus menjadi pedagang pakian khas Jogja mengatakan selama berjualan disini saya memang mengalami penurunan penghasilan namun saya meyakinkan kepada anggota-anggota bahwasanya suatu saat nanti akan ada masanya kami akan jaya Kembali seperti berjualan di tempat sebelumnya, memang sekarang belum nampak apa yang saya ucapkan tetapi pasti tempat ini jika sudah dikenali banyak orang pasti akan ramai (Sito. 24-03-24)

Kemudian hal ini ditambahkan juga oleh pak Edi. Beliau mengungkapkan kalau kondisi Teras Malioboro 2 sangat memperhatikan bagi PKL karena tidak ada pengunjung yang mau kesini, tetapi tempat ini hanya sebagai selter saja, semoga di tempat yang baru nanti yang katanya dibangun bersebelahan dengan Teras Malioboro 1 akan menjadi tempat yang sangat ramai di datangi pengunjung dan saya meyakini bahwasanya suatu saat akan sangat ramai jika sudah dibangun tempat yang baru (Edi. 24-03-24).

2). Penjualan Berbasis *Online*

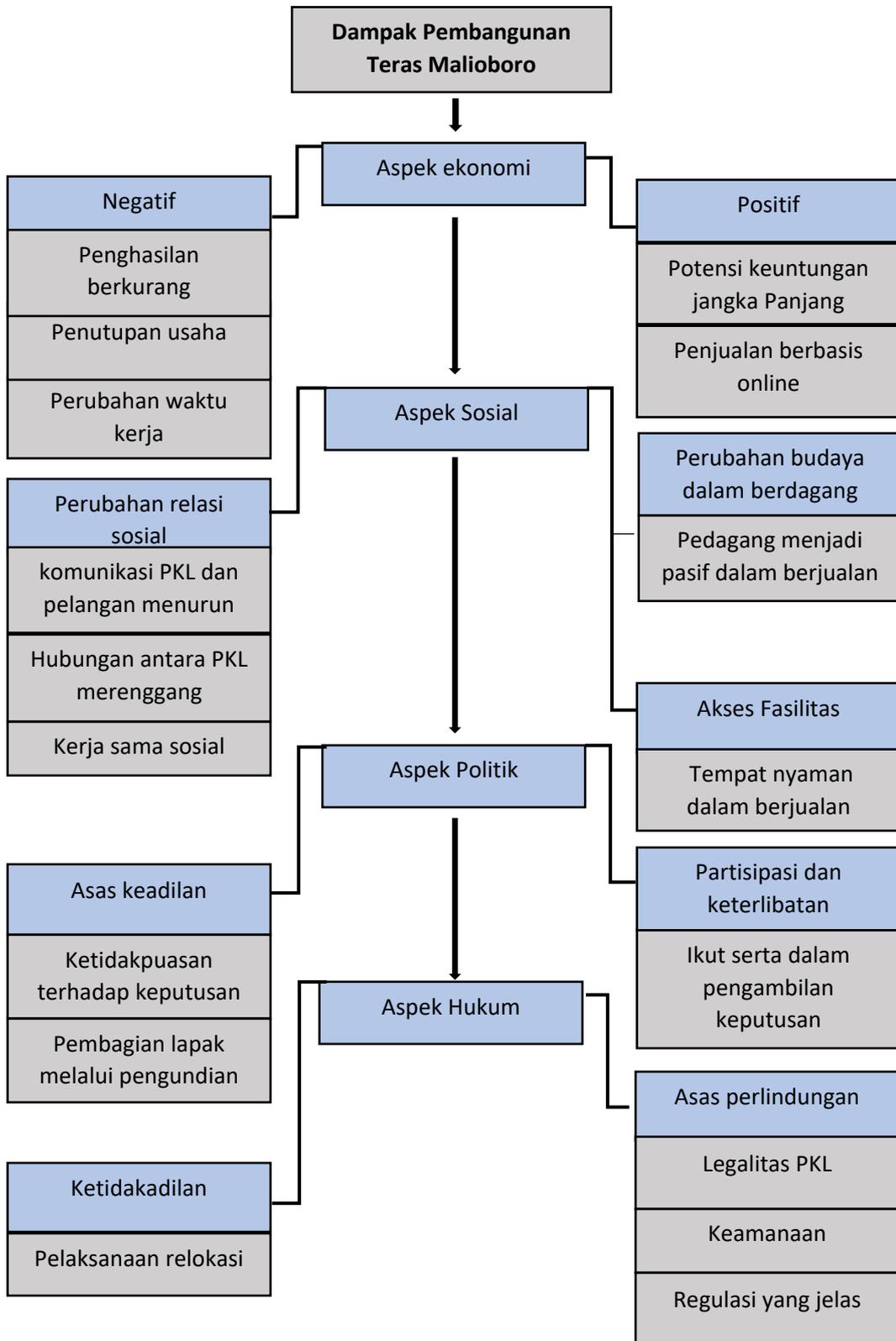
Tekanan terhadap kondisi ekonomi PKL yang terus memburuk menimbulkan suatu tantangan tersendiri bagi pengelola Teras Malioboro. Menanggapi berbagai keluhan yang diterima dari setiap PKL yang menduduki teras malioboro menimbulkan niat bagi

Balai Layanan Bisnis untuk membantu para PKL. Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Teras Malioboro untuk membantu meningkatkan penjualan UKM melalui promosi baik itu secara *online* maupun *offline*.

Dalam wawancara bersama ketua peguyuban Pemalni di Teras Malioboro 1. Beliau mengungkapkan bahwa Keadaan yang buruk setelah direlokasi membuat kami harus berjuang lebih keras lagi bagaimana caranya untuk tetap berjualan, pengelola juga turut membantu agar kondisi ekonomi setiap PKL tetap stabil. salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu berasal dari Dinas UMKM itu pelatihan untuk meningkatkan daya saing. Jadi teman-teman tidak berdagang secara konvensional atau duduk di lapak menunggu pembeli, tetapi sekarang kami dilatih untuk memanfaatkan teknologi digital untuk berjualan secara online, sehingga kami tidak hanya berjualan offline tetapi ada juga yang menjual bahan kerajinan melalui *online* (Slamet 18-03-240)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber diatas bahwa PKL mengalami kondisi yang sulit setelah direlokasi yang membuat mereka memaksa untuk berjuang lebih keras lagi agar tetap bertahan. Ini menunjukkan adanya perubahan dramatis dalam lingkungan berjualan mereka yang memperngaruhi keberlangsungan usaha mereka. Menanggapi hal tersebut pemerintah melalui pengelola memberikan dukungan mereka agar kestabilan ekonomi PKL tetap stabil. Salah satu dukungan yang diberikan adalah dengan melakukan pelatihan agar PKL mampu memanfaatkan sosial media untuk berjualan.

Keseluruhan pembahasan diatas dapat dilihat dari bagan berikut



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil analisis dan pembahasan data mengenai dampak pembangunan teras malioboro terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Aspek sosial

Relokasi menyebabkan penurunan interaksi sosial antara PKL dan pelanggan, serta mengendurkan hubungan antar PKL sendiri. Meskipun demikian, masih ada upaya menjaga solidaritas sosial melalui praktik pengumpulan uang iuran untuk saling membantu. Relokasi juga mengubah budaya berjualan PKL, membuat mereka menjadi lebih pasif dan mengubah persepsi tentang peran mereka sebagai pelayan wisatawan. PKL mendapatkan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat berjualan yang nyaman dan perlindungan dari cuaca buruk, yang membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Aspek politik

Partisipasi PKL dalam proses pengambilan keputusan relokasi sangat penting untuk membangun legitimasi politik terhadap keputusan tersebut. Ketika PKL merasa didengarkan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat mengurangi ketegangan politik dan

meningkatkan dukungan untuk relokasi. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut inklusif dan representatif dari seluruh komunitas PKL, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Ketidakpuasan terhadap keputusan relokasi dapat muncul jika PKL merasa tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atau kurang mendapatkan informasi yang memadai. Oleh karena itu, transparansi dan partisipasi yang lebih besar dari PKL dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan ketidakpuasan yang mungkin timbul. Selain itu, penggunaan metode seperti pengundian untuk pembagian tempat berjualan dapat membantu mencapai keadilan distributif yang lebih baik, meskipun perlu diingat bahwa ada kemungkinan PKL yang merasa tidak puas dengan hasil pengundian jika mereka mendapatkan lokasi yang dianggap kurang menguntungkan.

3. Aspek hukum

Kebijakan relokasi PKL di Teras Malioboro, Yogyakarta, merupakan langkah yang didasarkan pada regulasi hukum yang ada, termasuk Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surat Edaran Gubernur DIY. Sebelum relokasi, banyak PKL di Malioboro beroperasi tanpa izin resmi, sehingga relokasi memberi mereka legalitas yang lebih jelas dalam berjualan.

Di sisi lain, proses relokasi tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan PKL, terutama terkait dengan waktu yang singkat dan kurangnya dukungan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Meskipun lokasi baru di Teras Malioboro dipastikan aman dengan pengawasan yang ketat, tetapi ada kebutuhan untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada PKL agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Dalam hal regulasi, kebijakan tersebut memberikan kerangka yang lebih jelas terkait jam operasional PKL di Teras Malioboro, meskipun ada perbedaan dalam jam operasional antara lokasi yang berbeda. Namun, pelaksanaan yang terlalu terburu-buru dapat dianggap sebagai ketidakadilan bagi beberapa PKL yang merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

4. Aspek ekonomi

Pembangunan Teras Malioboro telah membawa dampak ekonomi yang kompleks bagi para pedagang kaki lima (PKL) di sekitarnya. Meskipun pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dari segi ekonomi, namun terdapat beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh PKL.

Salah satu dampak negatif yang signifikan adalah penurunan pendapatan para PKL setelah direlokasi ke lokasi yang kurang strategis. Banyak dari mereka mengalami penurunan pendapatan hingga mencapai

70-75%, akibat minimnya pengunjung di lokasi baru. Hal ini juga menyebabkan sebagian PKL terutama di Teras Malioboro 2 harus menutup lapak mereka karena tidak bisa bertahan dalam kondisi yang sulit.

Selain itu, waktu kerja PKL juga terpengaruh akibat minimnya pelanggan. Beberapa PKL hanya berjualan pada hari tertentu dalam seminggu karena tidak cukupnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meskipun demikian, terdapat juga dampak positif dari pembangunan Teras Malioboro. Para PKL dan pengelola Teras Malioboro optimis bahwa di masa mendatang, Teras Malioboro akan menjadi destinasi yang ramai dan diminati oleh wisatawan, sehingga berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang bagi PKL. Selain itu, upaya pengelola untuk membantu PKL meningkatkan penjualan melalui promosi online dan offline serta pelatihan dalam memanfaatkan teknologi digital juga merupakan langkah positif yang diambil untuk membantu PKL tetap bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap Dampak pembangunan teras Malioboro terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima, maka peneliti memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut;

1. Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan untuk menepati janji relokasi jilid 3 kepada PKL di Teras malioboro 2
2. Pengelola Teras Malioboro 1 dan 2 disarankan untuk selalu memantau kondisi ekonomi PKL melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis.
3. Pengelola disarankan untuk membantu PKL yang sudah tidak berjualan agar mereka bisa kembali berjualan
4. PKL disarankan agar tetap menjaga relasi sosial antara sesama pedagang
5. PKL disarankan untuk tidak terlalu bergantung kepada pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damsar, (2002). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta
: Gava Media.
- Todaro. (2007). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid I, Edisi Keenam.
Jakarta: Erlangga.
- Sunarti E. (2012). Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di
Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian
PB. Bogor [ID]: LPPM
- Yusuf, A.M (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan penelitian
gabungan. Jakarta: Pustaka media Group
- Kuncoro, M. (2018). Perencanaan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama.
- Rukminto, I. (2003). Adi. Intervensi Komunitas, Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat.
- Creswell, J.W. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan
Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Morissan M. dkk. (2017). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana
- Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Prastowo, Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan
Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kartono, Drajat Tri, and Hanif Nurcholis. (2016) "Konsep dan Teori
Pembangunan." *Jakarta: Pustaka Pelajar*.
- Salim, Emil. (1980). Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta : Mutiara
- Siagian, Sondang. P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia

Kodoatie, Robert J. (2005). Pengantar Manajemen Infrastruktur. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Soetarso, (1980) Kesejahteraan Sosial, Pelayanan sosial dan Kebijakan Sosial, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

Jurnal

HS, Ali Imron. Strategi dan usaha peningkatan kesejahteraan hidup nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam menghadapi perubahan iklim. *Jurnal Riptek*, 2012, 6(1).

Ruchendi, H. (2019). Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Subang. *OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 15-22.

Darmawan, D., Halizah, S. N., Sinambela, E. A., & Mardikaningsih, R. (2022). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kredit Usaha Rakyat. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 8(2), 175-180.

DP, Salsabilla Nathania, et al. (2023) "Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Teras Malioboro Yogyakarta." *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)* 3.1: 83-99.

Kurniawan, A.B., (2015). Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandu dalam Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. *E-Jurnal Administrasi Negara*, 3(5), pp.1605-1619.

Marsela, A. S., & Wijaya, A. (2020). Dampak Pengembangan Objek Wisata Goa Kreo Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 9(1), 848-856.

- Pratama, D. S., Gumilar, I., & Maulina, I. (2012). Analisis pendapatan nelayan tradisional pancing ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 3(3).
- Sapar, Sapar, Richard WE Lumintang, and Djoko Susanto. (2006) "Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Perilaku Kewirausahaan Pedagang Kakilima (Kasus Pedagang Kakilima Pemakai Gerobak USAha Makanan di Kota Bogor)." *Jurnal penyuluhan* 2.2.
- Saputra, R. B. (2014). Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan). *Jom Fisip*, 1
- Sesa, B., & Kodrat, R. (2023). Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Membuka Lapangan Kerja,(Studi Kasus di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu). *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(2), 71-88.
- Tarigan, Mustafa Kamal. (2018) Mewujudkan pembangunan dan penataan Wilayah Malioboro sebagai wilayah wisata ramah lingkungan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3.1: 305-311.
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, 6(2), 93-103.

Referensi tambahan

- Diana, Dwi Kurnia. 2008. Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Karangjati Bergas Kabupaten Semarang Tahun 2005-2007. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES

Rambe, A. 2004. Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat .Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan, Kota Sumatra Utara). Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.

4 Alasan Sultan HB X Tetap Merelokasi PKL Malioboro Awal Tahun Ini. (2022, January 27). Nasional tempo. Retrieved October 16, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1554470/4-alasan-sultan-hb-x-tetap-merelokasi-pkl-malioboro-awal-tahun-ini>.

PKL Malioboro Direlokasi, Pindah ke Mana? Halaman all - Kompas.com. (2022, January 20). Travel Kompas. Retrieved October 16, 2023, from <https://travel.kompas.com/read/2022/01/20/202316127/pkl-malioboro-direlokasi-pindah-ke-mana?page=all>.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang

PANDUAN WAWANCARA

Pelaksanaan Wawancara:

Hari/tanggal/waktu :

Identitas informan:

Nama :

Umur :

Alamat :

Jenis Pekerjaan :

Pertanyaan:

A. Asosiasi peguyuban pedagang kaki lima Yogyakarta

1. Apa tujuan dilakukanya pembangunan teras Malioboro?
2. Bagaimana proses relokasi PKL dari Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro?
3. Apa dampak yang timbul setelah dilakukanya relokasi PKL ke Teras Malioboro?
4. Apakah terdapat peningkatan atau penurunan dalam volume transaksi bisnis pedagang kaki lima sejak adanya Teras Malioboro?
5. Bagaimana asosiasi pedagang kaki lima mendukung pedagang kaki lima dalam menghadapi tantangan ekonomi yang muncul setelah relokasi?
6. Apakah asosiasi peguyuban kaki lima terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik terkait pembangunan Teras Malioboro?
7. Kenapa asosiasi pedagang kaki lima menolak dilakukanya relokasi PKL?
8. Bagaimana interaksi sosial yang terjadi di kalangan pedagang kaki lima setelah dilakukanya relokasi?

9. Pada saat dikeluarkan kebijakan relokasi pedagang kaki lima, apakah dari pemerintah memberikan sosialisasi terkait relokasi teras Malioboro?

B. Pedagang kaki lima

1. Menurut anda apa tujuan dari dilakukannya Pembangunan teras Malioboro?
2. Bagaimana peroses relokasi PKL dari kawasan Malioboro ke Teras Malioboro?
3. Apa dampak yang anda rasakan setelah dilakukan relokasi ke Teras Malioboro?
4. Bagaimana Anda merasakan perubahan dalam interaksi sosial sehari-hari dengan sesama pedagang kaki lima dan masyarakat sejak dimulainya pembangunan Teras Malioboro?
5. Bagaimana dampak pembangunan teras dalam hubungan Anda dengan pelanggan atau pengunjung di Teras Malioboro?
6. Bagaimana dampak pembangunan Teras Malioboro terhadap volume penjualan atau transaksi bisnis Anda selama berjualan di Teras Malioboro?
7. Apakah Anda mengalami peningkatan atau penurunan pendapatan sebagai pedagang kaki lima sejak berjualan di Teras Malioboro?
8. Berapa harga atau tarif sewa tempat usaha di Teras Malioboro ini?
9. Apakah Anda merasa terlibat atau terwakili dalam proses pengambilan keputusan politik terkait pembangunan Teras Malioboro?
10. Apakah kebijakan atau peraturan yang diterapkan sejak pembangunan Teras Malioboro memengaruhi operasional bisnis Anda?
11. Apakah ada perubahan terkait keamanan saat anda masih berjualan di Kawasan Malioboro dan ketika pindah ke Teras Malioboro?
12. Pada saat dilakukan relokasi apakah pemerintah melakukan sosialisasi kepada PKL?

LAMPIRAN

1. Wawancara bersama pak Fauzy pedagang angkringan di Teras Malioboro 1



2. Wawancara bersama mas Anwar pedagang batik di teras Malioboro 2



3. Wawancara bersama bapak Aris pedagang kaos di Teras Malioboro 1



4. Wawancara bersama bapak Jaswadi pedagang lesehan di Teras malioboro 2



5. Wawancara bersama ibu Dyanti pedagang bakpia di Teras Malioboro 1



6. Wawancara bersama mas Hadianto pedagang kaos di Teras Mlioboro 2



7. Wawancara bersama pak Sito ketua paguyuban PPMS Teras malioboro 1



8. wawancara bersama pak Edi pedagang aksesoris di Teras Malioboro 2



9. wawancara bersama pak Slamet ketua paguyuban Pemalni Teras Malioboro 1



10. wawancara bersama pak Guslim pedagang aksesoris di Teras malioboro 1

